



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah adalah Kota Palu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Metrologi Legal dengan Tipe A pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan pelayanan tera, dan tera ulang, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.
- (2) UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
 - b. pelaksanaan pelayanan tera, dan tera ulang alat UTTP;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan ketelusuran standar kerja dan

- perlengkapannya;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap penggunaan cap tanda tera;
 - e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera dan tera ulang ke Kas Umum Daerah;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD Metrologi Legal;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Metrologi Legal;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang kemetrologian;
- c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Metrologi Legal;
- d. melaksanakan pelayanan tera, dan tera ulang alat UTTP;
- e. melaksanakan penatausahaan sistem pengaduan dari pelanggan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap penggunaan cap tanda tera;
- g. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan penyerahan alat ukur/sampel yang ditera, tera ulang dan diuji serta penyerahan Surat Keterangan Hasil Pengujian kepada pelanggan;
- h. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD Metrologi Legal;
- i. melaksanakan penyusunan program operasional pelayan tera dan tera ulang;
- j. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Metrologi Legal; dan

1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD Metrologi Legal;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan UPTD Metrologi Legal;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan penyiapan dokumen atau bahan yang diperlukan dalam proses penyelesaian kegiatan sesuai dengan ketentuan/format yang berlaku;
- e. melaksanakan penatausahaan dan penyetoran serta laporan keuangan penerimaan retribusi pelayanan tera dan tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- f. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD Metrologi Legal;
- g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan UPTD dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala UPTD wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, pejabat yang ada pada UPTD yang menduduki jabatan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019

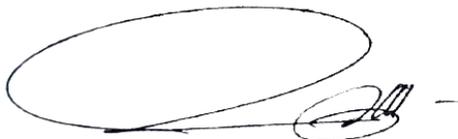
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

I M R A N

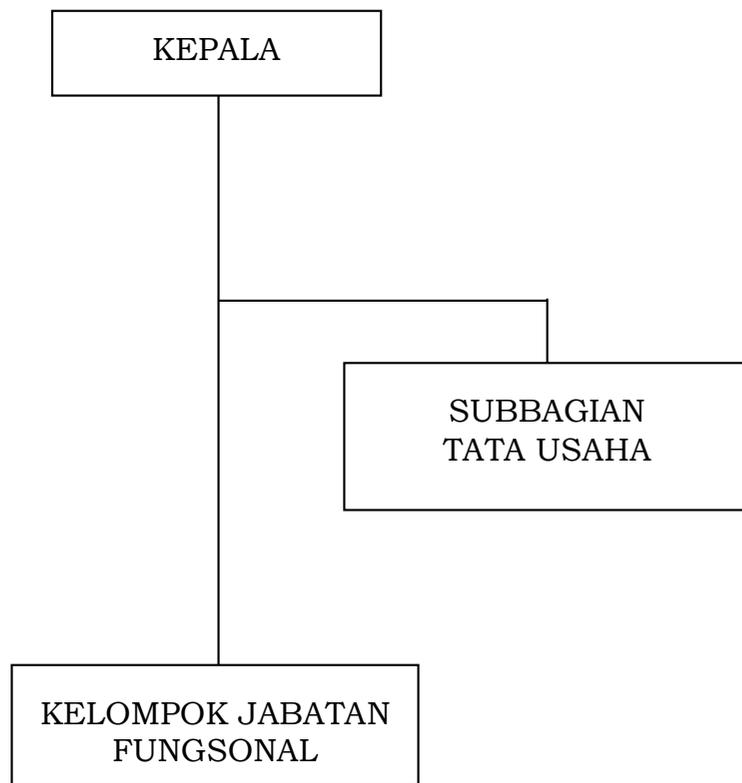
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PALU



WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004